

## ***Siaran Pers Solidaritas Perempuan***

### **Merespon Debat ke 2 Capres :**

#### **“Menilik Posisi Kandidat Presiden dan Wakil Presiden terhadap Kedaulatan Perempuan atas Pangan, Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup,”**

Jakarta, 17 Februari 2019. Malam ini Debat Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden kembali akan dilakukan. Persolan energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebijakan infrastruktur akan menjadi tema yang diangkat dalam debat kali ini. Sektor-sektor yang akan diperbincangkan tentunya merupakan sektor vital yang menyangkut kehidupan dan hak dasar bagi seluruh rakyat, tidak terkecuali perempuan yang selama ini memiliki peran besar dalam pengelolaan sumberdaya alam serta lingkungan hidup.

Selama beberapa dekade terakhir, sejak Orde Baru hingga saat ini, pengelolaan energi, pangan, maupun sumber daya alam dan lingkungan hidup jauh dari tujuan dibangunnya bangsa ini, yaitu untuk kemakmuran rakyat, perempuan maupun laki-laki. Sebaliknya, komodifikasi menjadi cara pandang dasar negara dalam melihat sumber daya alam, di mana tanah, hutan, air, pesisir, laut, kerap dihitung dalam nilai investasi, dengan menutup mata terhadap nilai-nilai kehidupan yang lebih esensi, termasuk di dalamnya, mengandung pengetahuan, nilai sosial, spiritual, serta keyakinan untuk keberlanjutan kehidupan. Begitu pun proyek-proyek energi dan infrastruktur yang kerap mengatasnamakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, nyatanya justru menghancurkan kehidupan masyarakat, terlebih perempuan.

Hal ini misalnya terlihat dari semakin meningkatnya konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) saja, telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria<sup>1</sup>. Berbagai konflik ini tidak terlepas dari arah pembangunan dan ekonomi negara yang bertumpu pada investasi termasuk di dalamnya untuk industri ekstraktif seperti tambang dan sawit, maupun proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan bandara, pelabuhan, hingga reklamasi yang kerap mengatasnamakan kepentingan umum, namun nyatanya lebih banyak mengakomodir investor pariwisata hingga kepentingan jalur perdagangan. Dalam situasi tersebut, perempuan yang selama ini sudah termarginalkan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah,<sup>2</sup> semakin kehilangan akses dan kontrolnya atas tanah, sehingga juga kehilangan kedaulatannya atas pangan. Tak hanya itu, semakin meningkatnya intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak mereka atas sumber daya alam dan lingkungan mereka, juga berdampak secara berlapis dan mendalam bagi perempuan.

Melihat rekam jejak para Kandidat Capres Cawapres yang lekat dengan para pengusaha dan perusahaan pendukung mereka<sup>3</sup>, maka menjadi penting untuk menyaksikan posisi mereka terhadap isu-isu yang akan diangkat di dalam debat. Penting untuk mencermati, sejauh mana para kandidat berani berkomitmen

---

<sup>1</sup> Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria, halaman 17.

<sup>2</sup> Hasil Temuan Riset Solidaritas Perempuan (*Feminist Participatory Action Research*) terkait Ketimpangan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan oleh Perempuan.

<sup>3</sup> <https://tirto.id/para-konglomerat-di-belakang-jokowi-dan-prabowo-pada-pilpres-2019-c1kn>,  
<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/jatam-soroti-perusahaan-tambang-di-sekitar-jokowi-prabowo/ar-BBTnpj5>,

untuk merombak cara pandang terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang selama ini telah menghasilkan berbagai Pelanggaran HAM, Penghancuran Bumi, dan Kekerasan terhadap Perempuan. Kita tentu berharap, kedua pasang kandidat mampu memberikan argumen substantif termasuk menyentuh isu perempuan yang selama ini peran dan posisi signifikannya dalam pengelolaan sumber daya telah diabaikan dan dihilangkan oleh negara maupun masyarakat.

*“Mari kita kritisi bersama, Debat Capres dan Cawapres malam ini, apakah para Capres dan Cawapres memiliki keberpihakan kepada perempuan, terkait program energi, pangan, sumberdaya alam dan lingkungan. Karena selama ini hak perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan masih belum terjamin dan terlindungi. Untuk menjadi pemimpin negeri ini, Capres dan Cawapres yang akan terpilih, harus berani memperjuangkan hak-hak perempuan, petani, nelayan dan masyarakat marginal lainnya. Karena penggusuran, perampasan ruang hidup masyarakat, dan penghancuran lingkungan merupakan penindasan terhadap perempuan.”* Ucap Puspa Dewy Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.

Lebih rinci, Puspa Dewy memaparkan beberapa poin utama desakan Solidaritas Perempuan kepada Presiden Indonesia di periode selanjutnya, yaitu ; 1) menjadikan perempuan sebagai subjek/stakeholder, sehingga terlibat dalam perencanaan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; 2)Merealisasikan harmonisasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar berperspektif keadilan gender, baik di tingkat nasional, daerah hingga desa; 3) Menghentikan berbagai proyek infrastruktur maupun iklim yang merampas sumber-sumber kehidupan dan ruang hidup masyarakat, termasuk yang didukung oleh lembaga keuangan internasional; 4) Merealisasikan penyelesaian konflik agraria yang adil serta inklusif, sensitif dan responsif gender; 5) Menghentikan kekerasan dan kriminalisasi, serta keterlibatan militer dan kepolisian dalam konflik agraria; 6) Merombak sistem ekonomi yang saat ini bertumpu pada investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi sistem ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat dan berkeadilan antara perempuan dan laki-laki.

Jakarta, 17 Februari 2019

Narahubung :

Ega : 081288794813